



KETIMPANGAN EKONOMI BELUM TERSELESAIKAN

Yogya Raih Indeks Pembangunan Manusia Tertinggi

UMBULHARJO (MERAPI) - Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Kota Yogyakarta tahun 2016 menempati posisi tertinggi se-Indonesia. Kendati demikian IPM terbaik itu tidak diikuti dengan ketimpangan ekonomi atau gini rasio yang membaik. Ketimpangan ekonomi antara si kaya dan miskin di Kota Yogyakarta masih tinggi.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta Harjono menjelaskan, IPM Kota Yogyakarta tahun 2016 mencapai 85,32. Angka IPM itu masuk kategori tinggi dan di atas IPM nasional sebesar 70,18. IPM digunakan untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses pembangunan. IPM juga menjadi salah satu indikator dalam pemberian dana alokasi umum dari pemerintah pusat ke daerah.

"Kota Yogyakarta masuk kategori tinggi karena nilainya lebih dari 80. Berturut-turut sejak tahun 2012 IPM Kota Yogyakarta mengalami peningkatan," kata Harjono dalam jumpa pers terkait IPM di Balaikota, Selasa (19/12).

Ada 4 aspek dalam penilaian IPM yakni angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan rata-rata pengeluaran riil perkapita. Menurutnya, pada aspek pengeluaran riil perkapita penilaian sulit dilakukan karena terkadang orang lupa saat ditanya pendapatan yang telah dikeluarkan.

Tapi angka IPM terbaik itu tidak diikuti dengan angka ketimpangan ekonomi atau gini rasio yang membaik. Dia menyebut angka gini rasio Kota Yogyakarta tahun 2016 adalah 0,429 persen. Angka tersebut kategori tinggi karena di atas gini rasio nasional yang hanya 0,394 persen. Sedangkan persentase kemiskinan di Kota Yogyakarta tahun 2016 sebesar 7,7 persen dari penduduk kota atau 32.060 jiwa.

"Gini rasio tinggi ini fenomena umum terjadi di wilayah perkotaan. Artinya 'kue' ekonomi hanya dinikmati penduduk menengah ke atas dan populasinya tidak sebanyak penduduk ekonomi bawah. Itu yang jadi sebab gini rasio jadi tinggi," terangnya.

Selain itu faktor manusia yang heterogen di Kota Yogyakarta, dinilainya mempengaruhi angka gini rasio di Kota Yogyakarta tinggi. Dia berpendapat angka IPM tidak harus sejalan dengan gini rasio karena gini rasio hanya melihat sisi konsumsi ekonomi masyarakat. Berbeda dengan IPM yang melihat juga dari aspek pendidikan dan kesehatan.

Dia mengutarakan untuk menekan gini rasio itu perlu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan pengendalian harga. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bisa dimaksimalkan dan memastikan rantai distribusi berjalan baik karena Kota Yogya bukan produsen," imbuh Harjono.

Sebelumnya Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan untuk mengurangi angka gini rasio dilakukan upaya pengentasan penduduk miskin. Dia menjelaskan strategi pengurangan kemiskinan dilakukan dengan program Kartu Menuju Sehat (KMS) dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui jaminan pendidikan dan kesehatan. Dalam APBD 2018 Kota Yogyakarta telah dialokasikan sekitar Rp 92 miliar untuk pengentasan kemiskinan. Di samping itu ke depan parameter KMS akan diperbarui untuk memetakan data kemiskinan lebih tajam.

Tindak Lanjut
 Untuk Ditanggapi
 Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005